

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kinerja simpang empat DPD Golkar masih dalam kondisi cukup baik dengan tingkat pelayanan C, sedangkan untuk derajat kejenuhannya masih belum mencapai angka kritis yaitu belum  $>0,75$  dengan nilai pada masing – masing kaki simpang yaitu :
  - a. Kaki simpang utara : 0,47
  - b. Kaki simpang selatan : 0,40
  - c. Kaki simpang timur : 0,58
  - d. Kaki simpang barat : 0,43
  
2. Pada simpang empat DPD Golkar pada *peak* pagi 74 kendaraan terlibat konflik lalu lintas, dengan 34 kendaraan terlibat konflik serius dan 40 kendaraan terlibat konflik non serius. Untuk *peak* siang 54 kendaraan terlibat konflik lalu lintas, dengan 39 kendaraan terlibat konflik serius dan 15 kendaraan terlibat konflik non serius. Sedangkan untuk *peak* sorenya sendiri 58 kendaraan terlibat konflik lalu lintas, dengan 33 kendaraan terlibat konflik serius dan 25 kendaraan terlibat konflik non serius.
  
3. Pengaturan APILL pada simpang empat DPD Golkar pada kondisi *eksisting 2 fase* diatur menjadi 2,5 *fase*. Dengan pengaturan *fase* menjadi 2,5 *fase* membuat *fase* hijau pada kaki simpang arah Solo-Jogja lebih dulu menyala, dan setelah beberapa saat baru *fase* hijau barat dan timur bersamaan hijau, hal ini dapat mengurangi terjadinya konflik lalu lintasdi bandingkan dengan kondisi *eksisting* yang menggunakan 2 *fase*.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis, diperlukan saran sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan perbaikan pada simpang bersinyal DPD Golkar Kabupaten Klaten agar kecelakaan dapat diminimalisir, saran yang diberikan antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten  
Melakukan pengaturan ulang *fase* eksisting yaitu 2 fase diubah menjadi 2,5 fase. Karena berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengaturan 2,5 fase dapat mengurangi terjadinya konflik lalu lintas dan untuk tingkat pelayanan simpang masih dalam kondisi cukup baik yaitu C.
2. Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kabupaten Klaten  
Untuk peningkatan keselamatan transportasi jalan pada Kabupaten Klaten, selain diperlukan perbaikan teknis perlu juga dilakukan sosialisasi tentang perilaku pengguna jalan dan dilakukannya pemberian materi mengenai rambu lalu lintas dan marka bagi masyarakat Kabupaten Klaten guna meningkatkan wawasan keselamatan berlalu lintas agar dalam berkendara di jalan lebih berkeselamatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten  
Pengadaan sistem *Area Traffic Control System (ATCS)* yang berguna untuk mengontrol dan sebagai pengawasan pada simpang yang sering terjadi kecelakaan seperti pada simpang DPD Golkar Kabupaten Klaten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Klaten. 2015. "Klaten Dalam Angka". Pemerintahan Kabupaten Klaten. Klaten:
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten. 2017. "Peta Jaringan Jalan". Pemerintah Kabupaten Klaten. Klaten: Dinas Pekerjaan Umum
- Direktorat Jenderal Binamarga, 1997. Manual Kapasitas Jalan (MKJI), Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Binamarga, Jakarta.
- Polres Kabupaten Klaten. 2017. "Data Kecelakaan Tahun 2014-2016". Klaten: Polres
- Fauziah, Hikmah. 2016. "Penanganan Konflik Lalu Lintas Di Simpang Bersinyal (studi kasus : Simpang Maktal, Kabupaten Garut)". Politeknik Keselamatan Transportsi Jalan. Tegal.
- Hidayat, Taufik dan Nina Istiadah. 2011. Panduan Lengkap Menguasai SPSS 19 Untuk Mengolah Data Statistik Penelitian. Semarang: PT. TransMedia.
- Khan, Muhammad Alawy. 2016. "Analisis Kebijakan Jalan Terus Pada Simpang Tiga Bersinyal Pasar Bojong Ditinjau Dari Keseriusan Konflik Lalu Lintas (Studi Kasus : Simpang Tiga Bersinyal Bojong Kabupaten Pekalongan)". Politeknik Keselamatan Transportsi Jalan. Tegal.
- Muhammad, Adam Al Faroby. 2016. "Kajian Tingkat Keseriusan Konflik Dan Peluang Kecelakaan Pejalan Kaki Pada Simpang Bersinyal Belok Kiri Langsung Di Kota Kediri (studi kasus : Simpang Dhodo dan Simpang Ringin Sirah)". Politeknik Keselamatan Transportsi Jalan. Tegal.
- Nugraha, Gemilang Widya. 2016. "Analisis Keselamatan Simpang Bersinyal Pada Simpang 4 Jetis Kota Salatiga. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal.
- Republik Indonesia. 2014. "Peraturan Menteri Nomor 49 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas". Kementerian Perhubungan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. "Peraturan Menteri Nomor 96 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Llalalu Lintas". Kementerian Perhubungan. Jakarta.
- The Swedish Traffic Conflict Technique. 1991. Sweden: Lund University